

## ANALISIS KONTRIBUSI LABA BUMN SEKTOR JASA INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN NEGARA 2011-2020

**Khofifah Dekriana Putri<sup>1</sup>, Nelly Masnila<sup>2</sup>, Anggeraini Oktarida<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: dekrianaoliv12@gmail.com<sup>1</sup>, nilahlilal@yahoo.com<sup>2</sup>, anggeraini\_oktarida@polsri.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian dengan pelaksanaan dan tujuan mengeksplorasi bagaimana trend pos aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha dan laba bersih BUMN sektor infrastruktur dan untuk mengetahui besaran kontribusi penerimaan bagiannya dengan keuntungan sektor dan infrastruktur terhadap kenegaraan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis trend dan analisis kontribusi. Sumber data yang digunakan adalah data laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi laba BUMN sektor infrastruktur terhadap pendapatan negara baru mencapai rata-rata kontribusi 0,0041% tercatat sejak tahun 2011-2020. Walaupun kontribusi yang diberikan belum tergolong tinggi namun hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja BUMN sektor infrastruktur terus mengalami perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha dan laba bersih. Selama periode tahun 2011-2020, total aset, ekuitas, pendapagan usaha dan laba bersih BUMN tumbuh rata-rata sebesar 21%, 28%, 11% dan 2% per tahun. Sedangkan kewajiban tumbuh rata-rata 22% per tahun. Tingkat kontribusi laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap pendapatan negara baru mencapai rata-rata kontribusi 0,0041% selama 10 tahun terakhir. Adapun kontribusi terbesar diberikan oleh PT Jasa Marga, dengan rata-rata sebesar 0,0217% dan kontribusi terendah diberikan oleh PT Adhi Karya dengan rata-rata sebesar 0,0026%.

**Kata Kunci : Kontribusi, Dividen, Badan Usaha Milik Negara, Pendapatan Negara.**

### Abstract

*This study aims to explore how the trend of assets, liabilities, equity, operating income and net income of SOEs in the infrastructure sector and to determine the contribution of the government's share of the profits of state-owned enterprises in the infrastructure sector to state revenues. This research uses quantitative descriptive with trend analysis method and contribution analysis. The data source used is data from the central government's financial statements for the 2011-2020 fiscal year. The results of the study show that the level of profit contribution of SOEs in the infrastructure sector to state revenues has only reached an average contribution of 0.0041% recorded since 2011-2020. Although the contribution given is not high, the results of the analysis that have been carried out show that the performance of SOEs in the infrastructure sector continues to experience positive developments. However, in 2020 there was a significant decline in the value of liabilities, equity, operating income and net income. During the period 2011-2020, the total assets, equity, business income and net profit of SOEs grew by an average of 21%, 28%, 11% and 2% per year. Meanwhile, liabilities grew by an average of 22% per year. The level of profit contribution of SOEs in the infrastructure service sector to state revenues has only reached an average contribution of 0.0041% over the last 10 years. The biggest contribution was given by PT Jasa Marga, with an average of 0.0217% and the lowest contribution was given by PT Adhi Karya with an average of 0.0026%.*

**Keywords: Contributions, Dividends, State Owned Enterprises, State Revenue.**

### 1. PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan negara sebagai piranti kebijakan fiskal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 22/Pmk.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Pusat, penerimaan Negara merupakan dengan masuknya penerimaan ke negara. Penerimaan pendapatan negara sebagai piranti kebijakan fiskal, berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan 22/Pmk.05/2020 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara terdiri dari berbagai macam pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Negara berkembang contohnya Indonesia memerlukan pendanaan dan pembiayaan untuk pembangunan. Dana pembangunannya berasal dengan keberagaman sumbernya. Pelaksanaan pembangunan itu dengan keperluan pendanaan bukan perpajakan. Berdasarkan target dan realisasinya dengan menerima penetapan dalam APBN, meskipun tidak bisa mencapai target yang ditetapkan, penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan. Selanjutnya, mengenai realisasi penerimaan negara bukan pajak yang dapat kita simpulkan PNBPN hampir setiap tahunnya dapat melebihi target anggaran, di tahun 2015 realisasi PNBPN dengan menurunkan penetapannya. Meskipun telah mencapai target realisasi PNBPN terus mengalami naik turun dari tahun 2011-2020, kemudian jika dibandingkan dengan penerimaan pajak, penerimaan PNBPN masih jauh tertinggal dari penerimaan pajak. Salah satu sumber PNBPN yaitu hasil kekayaan negara yang dipisahkan yang awalnya dengan pembagian dari pemerintahan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan 2019 yaitu tumbuh negatif 11,92% atau sebesar Rp6,03 triliun. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu perusahaan milik negara. Dipunyai pemerintah dengan maksud pemegang mayoritas, perencanaan pendapatan BUMN dengan usaha yang tidak sedikit.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) target dan realisasi yang terjadi yang masih terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2020 realisasi laba BUMN mengalami penurunan. Kemudian, pendapatan bagian pemerintah atas keuntungan dan perolehan negara. Kontribusi laba BUMN masih tergolong kecil untuk penerimaan negara jika

dibandingkan dari penerimaan pemerintah yang lain. Sesuai dengan masterplan bahwa “kementerian BUMN 2010-2014, pemerintah menjadikan BUMN sektor infrastruktur menjadi sektor usaha prioritas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sejalan dengan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Hal ini menjadi tantangan bagi BUMN sektor jasa infrastruktur agar selalu meningkatkan kinerjanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya dan meningkatkan daya saing perusahaan pada khususnya.”

Senada dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 4 tahun terakhir yang menjadi fokus utama Indonesia yaitu “pembangunan infrastruktur, hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan BUMN sektor jasa infrastruktur yang memiliki peran untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik sektor konstruksi, pembangunan perumahan, dan industri semen yang merupakan pemasok kebutuhan konstruksi. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, total Rp. 4.796 triliun diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur (yang ditetapkan pemerintah) pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya bisa memberikan kontribusi 41 persen untuk pembiayaan, sementara perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) hanya dapat memberikan kontribusi hingga 22 persen”. Analisis bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara. BUMN sektor jasa infrastruktur yang menjadi fokus penelitian sebagai perusahaan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pada sektor infrastruktur dan sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan negara pada APBN

## 2. TELAAH LITERATUR

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori agency ada dua pihak yang melakukan perjanjian ataupun kontrak yaitu mereka yang memberi wewenang dengan prinsip dan penerimaan wewenang dari agen (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Wahyuningtyas (2010) dalam penelitian Ariasih dan Sunarsih (2017) menjelaskan teori keagenan adalah sebuah wujud korelasi kontraktual, dengan tindakan dan cakupan kewenangan. Teori keagenan ini yaitu dengan pemerintah BUMN. Perencanaan dari (RPJMN) 2015-2019 memaparkan dengan peran agen pembangunan nasional dalam pelayanan publik (Asmara, 2016). Pemerintah dengan prinsip pemberian wewenang dan tugas dengan menjalankan pembangunan. Hubungan dan permasalahan agen dan pemerintahan BUMN menjadi target dengan memiliki kepentingan ataupun keuntungan.

### Penerimaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara menyatakan bahwa "Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah". Menurut Adetya (2014), "Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia". Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa pengertian dari penerimaan negara tersebut yaitu penerimaan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang bersumber dari berbagai sektor, yang akan digunakan untuk pembiayaan berdasar pada "Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022".

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), memiliki karakteristik yang unik, yang pengaturannya tidak hanya tunduk kepada "Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 2018

tentang PNBP dan turunannya. Namun, tunduk juga terhadap Undang-Undang sektoral masing-masing, PNBP yang berasal dari setoran dividen bagian pemerintah tunduk terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas."

### Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND) yaitu penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN. Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 menjelaskan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN merupakan salah satu komponen penerimaan negara bukan pajak yang cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PNBP. BUMN memang diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak, karena apabila kinerja BUMN rendah, maka dapat menimbulkan beban tambahan karena turut membengkakkan pengeluaran negara. Jadi, bukan penerimaan negara yang diraih. Pendapatan bagian laba badan usaha milik negara (BUMN), pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Pendapatan ini diklasifikasikan kedalam kelompok perbankan dan non perbankan".

### Penjelasan Umum Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan penjelasan umum dari "Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, BUMN merupakan salah satu wujud usaha pemerintah dalam melaksanakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan amanat pasal 33 UUD 1945 yaitu pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan maksud untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara”.

Menurut “Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), dijelaskan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

### **Peran Badan Usaha Milik Negara**

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi”. Kedudukan BUMN dengan agen dengan pelaksanaan fungsinya. Sebagai salah satu BUMN yaitu bentuk peran dengan penyemibang kekuatan besar, dengan keberagaman pajak dan APBN.

Peran BUMN sebagai agen pembangunan juga tidak terlepas dari amanat “pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Bentuk penguasaan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk BUMN.”

### **Dividen BUMN**

Menurut Sulindawati dkk (2017:132) “dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut adapun pengertian menurut Asnawi dan Wijaya (2015:133) dividen merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh pemegang saham”.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai dividen tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu “dividen merupakan bagian laba yang dihasilkan suatu perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dalam sebuah perseroan, penentuan pembagian dividen (waktu dan besarnya) didasarkan pada hasil keputusan Rapat Umum/Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan dapat membagi dividen kepada shareholder dalam bentuk tunai (cash dividend) maupun dalam bentuk saham (stock dividend). Dividend dalam bentuk tunai merupakan yang paling umum dibagikan, dividen BUMN yang disetorkan ke APBN merupakan salah satu bentuk kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara yang termasuk dalam sumber penerimaan negara bukan pajak”.

### **Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2017) “Analisis Laporan Keuangan merupakan menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi bagian informasi yang lebih kecil serta melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk melihat kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” Berdasar pada pengertian tersebut kemudian diambil garis besar mengenai keadaan dengan menghasilkan keputusan yang tepat.

Teknik dalam analisa laporan yaitu dengan memakai metode Trend analisis. Trend adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pergerakan suatu data baik itu turun maupun naik. Dari analisis Trend kita mengetahui kondisi suatu perusahaan baik dari segi laporan keuangan maupun manajemen dari perusahaan tersebut. Analisis Trend dengan pelaksanaan dan tujuan dari keuangan, dengan naik ataupun turunnya penetapan (Veno 2016). Analisis Trend merupakan pendekatan dengan memakai pembandingan perusahaan, dengan asumsi hasil kerja dan lainnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Kajian ini dengan tujuan gambaran kondisi trend aset, libailitas, ekuitas, pendapatan usaha BUMN Sektor Jasa Infrastruktur dan kontribusi Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Sektor Jasa Infrastruktur terhadap

Pendapatan Negara. Dengan pemberian penggambaran, Metode dan dengan banyaknya penjumlahan BUMN. Mengingat banyaknya data, penghitungan hanya dilakukan dalam rentang periode 2010 s.d. 2020.

Dengan uraian data tersebut, ada analisa data dan faktanya, memakai analisa penggambaran kontribusi keuntungan BUMN. Bentuk tersebut dengan gambaran umum penerimaan dengan harapan pemberian yang mendasar dari rumusan. Kajian ini dengan jenis data yang dipakai yaitu data sekunder, pengumpulan data dengan dokumenter. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011-2020.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis trend atau tendensi, untuk menganalisis posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui tendensi suatu keadaan laporan keuangan perusahaan apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan menurun.

$$\text{Angka Indeks} = \frac{\text{Tahun Pembanding}}{\text{Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Definisi :

Tahun Pembanding = Angka pos Laporan Keuangan tahun pembanding.

Tahun Dasar = Angka pos Laporan Keuangan tahun dasar.

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan laba BUMN dalam mendukung pendapatan negara. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dari laba BUMN dengan realisasi penerimaan pendapatan negara. Adapun rumus kontribusi yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Bagian Laba BUMN}}{\text{Pendapatan Negara}} \times 100\%$$

Untuk menjawab rumusan masalah kedua peneliti mengumpulkan dan mengolah data realisasi laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan negara selama tahun tahun anggaran 2011-2020 yang didapatkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2011-2020, kemudian data tersebut diolah untuk mengetahui kontribusi BUMN sektor jasa infrastruktur selama tahun anggaran 2011-2020. Dengan membandingkan hasil analisis dari tahun ke tahun selama tahun

2011-2020, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

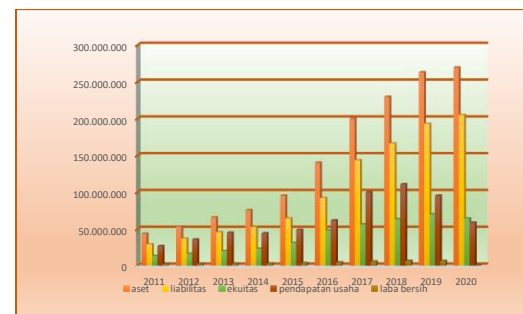
#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Bagian ini menjelaskan laporan hasil penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan deskripsi analisis yang diperlukan yang merupakan jawaban secara empiris terhadap pertanyaan pada pokok masalah penelitian.

##### **Perkembangan kondisi Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMN Sektor Jasa Infrastruktur dengan Metode Tren Selama Tahun anggaran 2011-2020**

Adapun sebagai berikut disajikan grafik mengenai Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMN Sektor jasa Infrastruktur tahun anggaran 2011-2020.

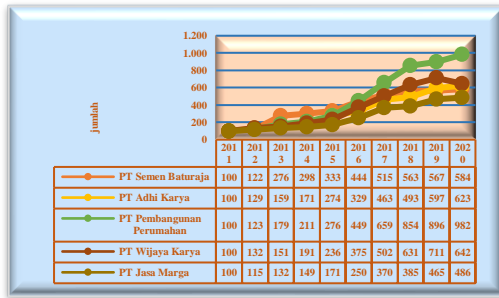


Sumber : (data diolah, 2022)

**Grafik 1**  
**Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha, Laba Bersih BUMN Sektor Jasa Infrastruktur Tahun Anggaran 2011-2022**

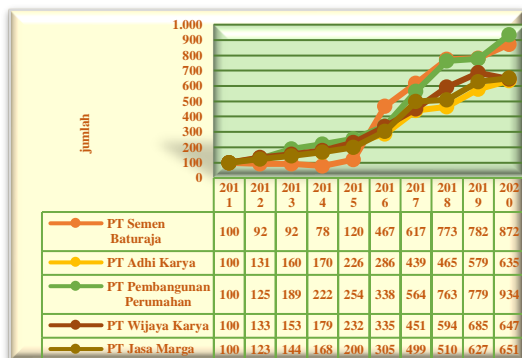
Kinerja BUMN sektor infrastruktur terus mengalami perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha dan laba bersih. Selama periode tahun 2011-2020, total aset dan ekuitas BUMN tumbuh rata-rata sebesar 21% dan 28% per tahun, Sementara itu, pendapatan usaha dan laba bersih masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 11% dan 2% persen per tahun. Sedangkan kewajiban tumbuh rata-rata 22% per tahun.

Selanjutnya dapat dilihat rincian dari perkembangan pos aset dapat dilihat pada grafik 2 dibawah ini sebagai berikut :



Sumber: : (data diolah, 2022)  
**Grafik 2**  
**Total Aset Tahun Anggaran 2011-2020**  
 (dalam %)

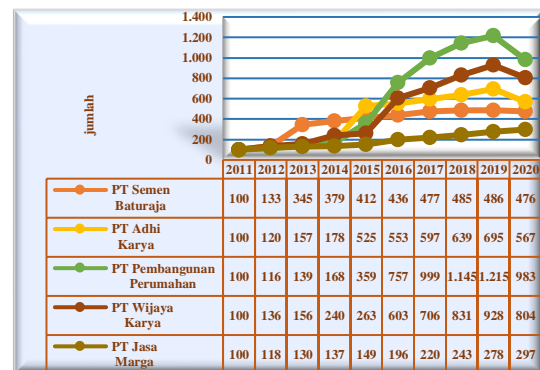
Berdasarkan Grafik 2 BUMN sektor jasa infrastruktur yang menyumbang nominal Trend total aset tertinggi ialah PT Pembangunan Perumahan dengan persentase sebesar 982% pada tahun 2020, Artinya disini PT Pembangunan Perumahan mengalami perkembangan total aset. infrastruktur yang menyumbang nominal pada Trend total aset terendah ialah PT Jasa Marga dengan persentase sebesar 115% pada tahun 2012. Selanjutnya liabilitas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber: : (data diolah, 2022)  
**Grafik 3**  
**Trend Total Liabilitas Tahun Anggaran 2011-2020**  
 (dalam %)

Berdasarkan Grafik 3 mengenai trend liabilitas diketahui bahwa total liabilitas secara rata-rata selama 10 tahun dengan keterangan tahun dasar adalah tahun anggaran 2011, BUMN sektor jasa infrastruktur yang memiliki Trend liabilitas tertinggi yaitu “PT Pembangunan Perumahan dengan persentase sebesar 934% pada tahun 2020 dan persentase terendah terjadi pada PT Semen Baturaja dengan Trend hanya sebesar 78% di tahun 2014. Jumlah liabilitas PT Semen Baturaja pada 2014 tercatat sebesar Rp209 miliar, di mana

angka ini mengalami penurunan sebesar Rp35 miliar atau 14% dari Rp244 miliar yang tercatat pada 2013. Penurunan jumlah liabilitas didorong oleh faktor penurunan utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, imbalan kerja jangka pendek, pajak tangguhan, imbalan kerja, dan utang kepada pihak berelasi serta provisi reklamasi dan pasca tambang. Pada 2014, liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp180 miliar. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp14 miliar atau 7% dari Rp194 miliar yang tercatat pada 2013. Penurunan liabilitas jangka pendek khususnya berasal dari penurunan utang pajak, biaya yang masih harus dibayar dan imbalan kerja jangka pendek. Liabilitas jangka panjang pada 2014 tercatat sebesar Rp29 miliar.” Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp21 miliar atau 42% dibandingkan 2013 yang tercatat sebesar Rp51 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan, liabilitas imbalan kerja, dan utang kepada pihak berelasi. Selanjutnya trend ekuitas dapat dilihat sebagai berikut :



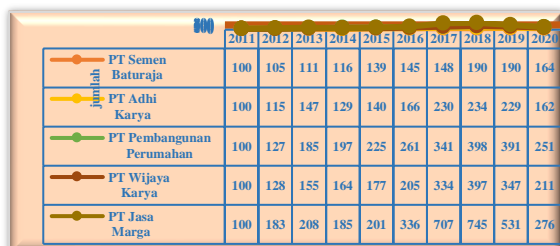
Sumber : (data diolah, 2022)  
**Grafik 4**  
**Trend Ekuitas Tahun Anggaran 2011-2020**  
 (dalam %)

Berdasarkan Grafik 4 dapat di lihat pada jika ditinjau dari BUMN sektor jasa infrastruktur yang menyumbang Trend ekuitas tertinggi ialah PT Pembangunan Perumahan dengan persentase sebesar 1.215% pada tahun 2019 dan BUMN sektor jasa infrastruktur yang menyumbang Trend terendah ialah PT Pembangunan Perumahan dengan persentase sebesar 116% pada tahun 2012,

Berdasarkan Grafik 4 dapat dilihat dari trend ekuitas pada tahun 2019, terjadi peningkatan ekuitas yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun dasar. Adapun

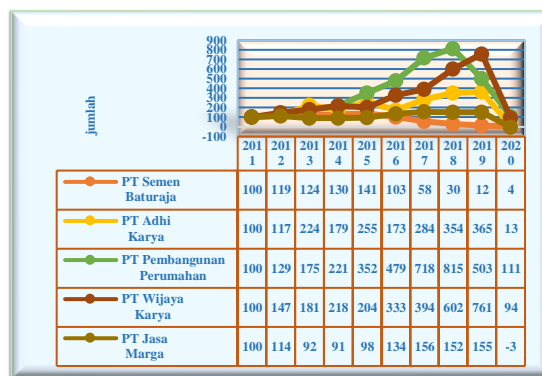
berdasarkan hasil analisis diperoleh total ekuitas PT Pembangunan Perumahan tahun 2019 mencapai Rp33 triliun, mengalami peningkatan 6,19% dibandingkan total ekuitas tahun 2018 sebesar Rp32triliun. jumlah ekuitas perusahaan dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang terdiri dari ekuitas saham, tambahan ekuitas disetor, penghasilan komprehensif lain dan saldo laba, serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali. dibandingkan tahun 2018, jumlah ekuitas tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,19% yang terutama disebabkan kenaikan saldo laba karena laba yang dibukukan perusahaan di tahun sebelumnya.

Adapun selanjutnya disajikan Grafik 4.5 ditinjau dari BUMN sektor jasa infrastruktur yang menyumbang Trend Pendapatan Usaha tertinggi ialah PT Jasa Marga dengan persentase sebesar 745% pada tahun 2018. Adapun berdasarkan hasil analisis mengenai peningkatan pendapatan usaha PT Jasa Marga. Pada tahun 2018 pendapatan usaha meningkat menjadi 359% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 341%. Peningkatan terjadi tahun 2018 sebesar 18%, pendapatan Perseroan mencapai Rp36,97 triliun atau naik 5,36% dari Pendapatan tahun 2017. Untuk dapat melakukan analisa secara lebih tepat, diharapkan untuk dapat menggunakan pendapatan diluar pendapatan konstruksi. Hal ini mengingat, Pendapatan Konstruksi akan net off dengan beban konstruksi, dan margin konstruksi yang didapatkan tidak signifikan. Selanjutnya BUMN sektor jasa infrastruktur yang menyumbang Trend pendapatan usaha terendah ialah PT Semen Baturaja dengan persentase sebesar 105% pada tahun 2012. Lebih lanjut meninjau Trend pendapatan usaha untuk tahun anggaran 2011-2020 untuk masing-masing perusahaan persero di lampirkan terperinci pada grafik 5 di bawah ini:



Sumber : (data diolah, 2022)  
**Grafik 5**  
**Trend Pendapatan Usaha Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam %)**

Pada grafik 6 jika ditinjau dari perusahaan persero yang menyumbang Trend tertinggi ialah PT Pembangunan Perumahan dengan persentase sebesar 815 % pada tahun 2018 dan perusahaan persero yang menyumbang Trend terendah ialah PT Jasa Marga dengan persentase sebesar -3% pada tahun 2020, Hal ini menunjukkan bahwa PT Jasa Marga mengalami penurunan ekuitas yang sangat drastis. Rincian mengenai Trend laba bersih BUMN sektor jasa infrastruktur selama tahun anggaran 2011-2020 dapat dilihat pada grafik 6 sebagai berikut:



Sumber : (data diolah, 2022)  
**Grafik 6**  
**Trend Laba Bersih Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam %)**

PT Jasa Marga mengalami penurunan ekuitas yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu memiliki nominal laba bersih sebesar rugi senilai Rp41,63 miliar, turun Rp2,12 triliun atau 102,01% dari tahun 2019. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa penurunan ini khususnya berasal dari Laba Sebelum Pajak Penghasilan senilai Rp696,45 miliar. Sedangkan Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk mencapai laba senilai Rp501,05 miliar. Perusahaan tetap dapat mencetak Laba Bersih di tengah kondisi penurunan Pendapatan Tol karena adanya pandemi COVID-19 dan kenaikan Biaya Keuangan karena pengoperasian ruas-ruas tol baru.

**Kontribusi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terhadap Penerimaan Negara**

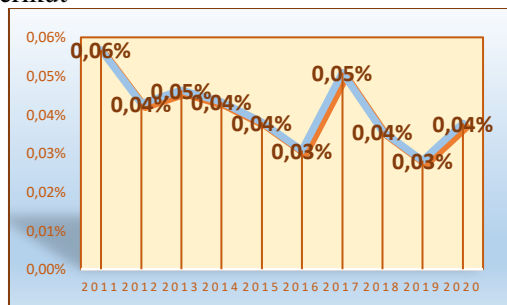
Kenaikan dan Penurunan perolehan kontribusi laba BUMN sektor infrastruktur terhadap penerimaan negara dari tahun 2011-2020 dapat dilihat lebih jelas pada pada tabel 1 sebagai berikut;

**Tabel 1**  
**Kontribusi bagian pemerintah atas Laba BUMN**  
**sektor jasa infrastruktur terhadap Pendapatan**  
**Negara selama Tahun Anggaran 2011-2020**  
**(dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Negara	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sektor jasa infrastruktur	kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	687.320.015.379	0,06%
2012	1.338.109.629.172.950	574.213.184.000	0,04%
2013	1.438.891.069.562.740	666.910.762.804	0,05%
2014	1.550.490.813.616.970	671.650.678.651	0,04%
2015	1.508.020.372.856.320	573.844.606.956	0,04%
2016	1.555.934.150.832.790	477.899.845.216	0,03%
2017	1.666.375.912.658.080	848.257.232.333	0,05%
2018	1.943.674.876.878.790	693.026.895.118	0,04%
2019	1.960.633.583.585.980	550.881.538.899	0,03%
2020	1.647.783.342.188.980	622.429.765.917	0,04%

Sumber: (data diolah, 2022)

Selanjutnya untuk melihat trend Kontribusi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap Pendapatan Negara selama Tahun Anggaran 2011-2020 dapat dilihat pada Grafik 7 sebagai berikut



Sumber: (data diolah, 2022)

**Grafik 7**

**Kontribusi Bagian Pemerintah atas Laba**  
**BUMN Sektor Jasa Infrastruktur terhadap**  
**Pendapatan Negara selama Tahun Anggaran**  
**2011-2020 (dalam %)**

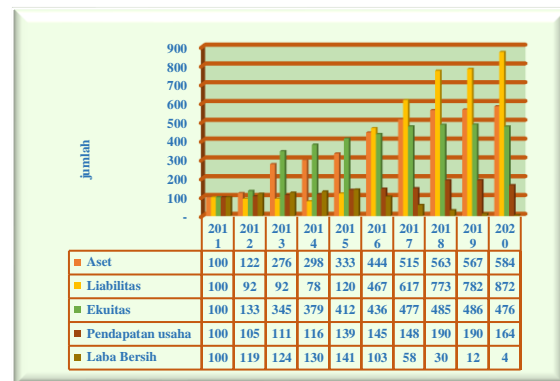
Dilihat dari persentase kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap pendapatan negara selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terus mengalami fluktuasi, dalam kontribusinya ke pendapatan negara mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

**Pembahasan**

**Trend Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha, dan Laba Bersih**

Untuk menilai apakah kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan baik dapat dengan mengidentifikasi dan meninjau trend posisi

keuangan perusahaan diprosikan dengan trend Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan Usaha, dan Laba Bersih perusahaan yang diteliti. Tinjauan ini juga dilakukan untuk dapat dapat menarik kesimpulan yang menyatakan apakah perusahaan yang diteliti dapat dikatakan berpotensi memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dengan meninjau masing-masing trend pos tersebut yang dilakukan pada masing-masing perusahaan yang diteliti, gambaran trend masing-masing pos yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir terhitung sejak 2011-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: (data diolah, 2022)

**Grafik 8**

**PT Semen Baturaja Tahun Anggaran 2011-2020**  
**(dalam %)**

Berdasarkan grafik 8 dapat dilihat Trend Aset PT Semen Baturaja terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020. Peningkatan trend aset terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan nilai trend 276% meningkat sebesar 154% dibandingkan pada tahun 2012 yaitu dengan trend aset 122%. Jika dilihat dari nominal peningkatan aset PT Semen Baturaja ditahun 2013 sebesar Rp2.711 triliun atau tumbuh 126% dari tahun 2012 sebesar Rp.1.199 triliun. Peningkatan tersebut diperoleh dari penerimaan hasil *Initial Public Offering* sebesar Rp1.268 triliun dan perolehan laba bersih tahun 2013 sebesar Rp312.184 miliar. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan menurut Hana (2018). “Total aset memiliki hubungan dengan laba bersih, adalah semakin cepat tingkat total aset maka laba yang dihasilkan akan meningkat.” Artinya karena perusahaan sudah memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan yang dapat mempengaruhi laba bersih setiap tahunnya.



Trend aset PT Semen Baturaja terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020.

Sedangkan pada Trend Liabilitas mengalami penurunan pada 2012-2014 kemudian pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan drastis atas liabilitas berturut-turut. Peningkatan liabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 872%, dilanjutkan pada tahun 2019 sebesar 782%. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 773%, diikuti pada tahun 2017 sebesar 617%, selanjutnya diikuti pada tahun 2016 sebesar 467%, selanjutnya tahun 2015 sebesar 120% kemudian diikuti tahun 2012 dan 2013 sebesar 92%. Sedangkan Liabilitas terendah terjadi pada tahun 2014 dengan penurunan trend liabilitas menjadi 78%. Jumlah liabilitas pada 2014 tercatat sebesar Rp209 miliar, di mana angka ini mengalami penurunan sebesar Rp35 miliar atau 14% dari Rp244 miliar yang tercatat pada 2013. Penurunan jumlah liabilitas didorong oleh faktor penurunan utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, imbalan kerja jangka pendek, pajak tangguhan, imbalan kerja, dan utang kepada pihak berelasi serta provisi reklamasi dan pasca tambang. Peningkatan tertinggi liabilitas terjadi pada tahun 2016, yaitu dengan trend sebesar 467% meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dengan trend sebesar 120%, terjadi peningkatan sebesar 347%, Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada liabilitas lancar sebesar 25% maka jumlah liabilitas juga mengalami peningkatan sebesar 291% atau Rp. 928.804 juta dari Rp. 319.315 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 1.248.119 juta di tahun 2016. Liabilitas lancar mengalami peningkatan sebesar Rp. 57,544 juta atau 25% dari Rp. 234.694 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 292.238 juta di tahun 2016. Peningkatan tersebut terjadi utamanya karena peningkatan yang terjadi pada:

1. Utang usaha pihak berelasi naik sebesar Rp.45.148 juta atau 203% dari Rp. 22.226 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 67.374 juta di tahun 2016.
2. Beban akrual naik sebesar Rp. 27.546 juta atau 60 % dari Rp. 45.923 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 73.469 juta di tahun 2016.
3. Utang Bank jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp. 15.619 ditahun 2016 dimana tahun tahun sebelumnya nihil.

Liabilitas tidak lancar PT Semen Baturaja pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan,

liabilitas tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp. 871.260 juta atau 1.030% dari Rp. 84.622 juta di tahun 2015 menjadi Rp. 955.882 juta di tahun 2016 yang disebabkan oleh:

1. Kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp.624.119 juta dari tidak ada pada tahun sebelumnya.
2. Kenaikan utang retensi sebesar Rp.271.776 juta atau naik 1.275% dari tahun 2015 sebesar Rp.21.301 juta

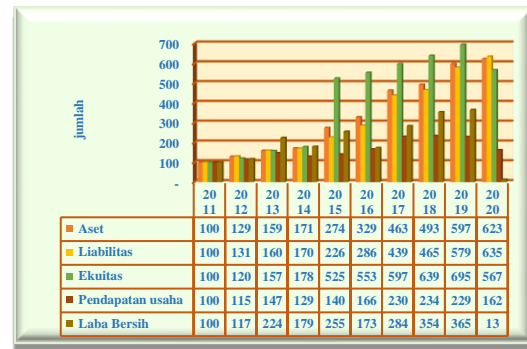
Lain halnya yang terjadi pada Trend Ekuitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 486%, dilanjutkan pada tahun 2018 sebesar 485%. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 477%, diikuti pada tahun 2020 sebesar 476%, selanjutnya diikuti pada tahun 2016 sebesar 436%, selanjutnya tahun 2015 sebesar 412% kemudian diikuti tahun 2014 Sebesar 379, diikuti pada tahun 2013 sebesar 345%, selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 133%. Nilai trend ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu dengan trend 133% pada tahun 2012 meningkat 212% menjadi 345% pada tahun 2013. Ekuitas pada 2013 sebesar Rp.2.467 triliun meningkat 159% dibanding tahun 2012 sebesar Rp.954.138 miliar. Peningkatan tersebut diperoleh dari penerimaan hasil *Initial Public Offering* sebesar Rp.1.268 triliun dan perolehan laba tahun 2013 sebesar Rp.312.184 miliar. Dapat disimpulkan pada grafik 4.13 bahwa trend ekuitas PT Semen Baturaja mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan trend ekuitas dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Selaras dengan trend ekuitas, pada Trend pendapatan usaha PT Semen Baturaja mengalami peningkatan setiap tahun dari 2011-2019 kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan trend pendapatan usaha. PT Semen Baturaja berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 1,89% year-on-year (yoy) menjadi Rp 1,55 triliun pada tahun 2015. Pada 2016, hanya mencatatkan pendapatan sejumlah Rp 1,52 miliar. Dilihat dari kontribusi pendapatan, penjualan semen masih menjadi kontributor utama pendapatan senilai Rp1,69 triliun. Penjualan semen ini turun 14,09% dibandingkan 2019 senilai Rp1,98 triliun. Adapun, penjualan di pasar basis perseroan yaitu Sumatera Selatan dan Lampung turun 15,19% secara tahunan menjadi Rp1,52 triliun.

Penjualan di pasar nonbasis turun lebih terbatas 2,92% menjadi Rp171,77 miliar. Di sisi lain, jumlah penjualan terak meningkat signifikan menjadi Rp19,62 miliar dari sebelumnya Rp3,17 miliar. Sedangkan pendapatan dari jasa angkutan dan lainnya terkoreksi 18,58% menjadi Rp5,74 miliar.

Trend Laba Bersih PT Semen Baturaja mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, namun pada tahun 2016-2020 terjadi penurunan pos laba bersih PT Semen Baturaja, persentase trend laba bersih terendah PT Semen Baturaja terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4%, dilanjutkan dengan nilai trend sebesar 12% pada tahun 2019, kemudian diikuti trend 30% pada tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan trend 58% pada tahun 2017, dan yang terakhir terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu trend laba bersih senilai 103%, dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 141%. Nilai trend laba bersih pada tahun 2020 dapat dikatakan sangat rendah, hal ini dapat diartikan laba bersih mengalami penurunan dari tahun dasar. PT Semen Baturaja mencatatkan penurunan laba sebesar 43,40% dari Rp 259,09 miliar pada 2016 menjadi hanya Rp 146,64 miliar pada akhir 2017. Laba turun karena terjadi peningkatan beban. PT Semen Baturaja mencatat kenaikan beban pokok penjualan, beban penjualan, serta beban umum dan administrasi. Pada 2017, beban pokok penjualan naik sebesar 6,61% yoy menjadi Rp 1,08 triliun, peningkatan beban pokok penjualan tersebut tak terlalu signifikan dibanding kenaikan beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Tercatat, beban penjualan melonjak 68,10% yoy menjadi Rp 85,40 miliar. Sementara, beban umum dan administrasi juga naik 43,23% yoy menjadi Rp 199,81 miliar. Kemudian laba bersih di tahun 2019 terus mengalami penurunan menjadi Rp 30 miliar karena peningkatan beban keuangan karena adanya beban biaya bunga atas kredit investasi Pabrik Baturaja II sebesar Rp 100 miliar dan bunga pinjaman MTN sebesar Rp 25 miliar.

Selanjutnya untuk PT Adhi Karya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: (data diolah, 2022)

Grafik 9

PT Adhi Karya Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam %)

Berdasarkan Grafik 9 dapat kita lihat trend Aset PT Adhi Karya terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020. Peningkatan trend tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 623%, hal tersebut dapat diartikan bahwa aset perusahaan mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun dasar. Peningkatan trend terbesar terjadi pada tahun 2017, 463% dibandingkan dengan tahun 2016 dengan trend aset sebesar 329%, terjadi kenaikan sebesar 134%. Total aset pada 2017 sebesar Rp 1.889,9 miliar, naik 0,4% (nol koma empat persen) dari Rp 1.881,6 miliar pada 2016. Kenaikan terutama dari aset lancar perusahaan, yaitu akun Kas dan Setara Kas. Sementara itu Perseroan juga berhasil mengurangi persediaan barang dagang, yang artinya perbaikan modal kerja untuk Perseroan. Untuk aset tidak lancar, terjadi penurunan terutama dari aset tetap karena perseroan menutup beberapa toko di tahun 2017 dan sejumlah aset tetap telah habis disusutkan.

Kemudian Trend Liabilitas mengalami peningkatan pada 2012-2020. Peningkatan trend kewajiban tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 635%, yang artinya terjadi peningkatan yang besar dibandingkan dengan tahun dasar. Liabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 439% dibandingkan dengan trend aset pada tahun 2016 yaitu 286%. Pada 2017, total liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp 184,6 miliar atau meningkat 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) dari Rp 153,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan di liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh naiknya hutang dagang, yaitu hutang atas pembelian barang dagang dari supplier. Sementara untuk liabilitas jangka panjang, Perseroan mencatat kenaikan

untuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang, yang berkaitan dengan masa pensiun karyawan Perseroan.

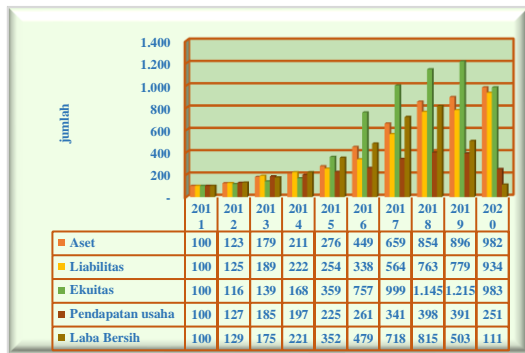
Selanjutnya diikuti dengan Trend Ekuitas PT Adhi Karya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan modal. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu terjadi peningkatan 347%, pada tahun 2014 trend ekuitas sebesar 178% meningkat menjadi 525% pada tahun 2015. Jumlah Ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp3,5 triliun atau 214,6% menjadi Rp5,2 triliun dari Rp1,6 triliun di tahun 2014. Hal ini dikontribusikan terutama oleh peningkatan Tambahan Modal Disetor secara signifikan sebesar Rp2,5 triliun, Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp264,3 miliar, serta peningkatan di Saldo Laba belum Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp126,8 miliar. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan ekuitas sebesar 128% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Jumlah ekuitas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.575 miliar, turun 18,43% dari tahun sebelumnya Rp6.834 miliar. Penurunan jumlah ekuitas tersebut utamanya disebabkan turunnya laba tahun berjalan sebesar Rp641 miliar atau setara dengan 96,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disamping itu pada tahun 2020 ADHI melakukan penerapan awal atas PSAK Baru (PSAK 71, 72 dan 73), dimana atas penerapan awal tersebut berdampak pada penurunan ekuitas ADHI sebesar Rp1.260 miliar.

Selanjutnya untuk Trend Pendapatan usaha PT Adhi Karya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, adapun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pos aset, kewajiban dan modal. Peningkatan trend pendapatan usaha terbesar terjadi pada tahun 2013, terjadi peningkatan sebesar 64%, pada tahun 2014 trend pendapatan usaha yaitu sebesar 230% dibandingkan dengan trend pada tahun 2013 sebesar 166%. Selanjutnya jika dinilai dari trend pendapatan usaha PT Adhi Karya tertinggi selama 10 tahun terakhir, terjadi pada tahun 2018, yaitu dengan trend sebesar 234%. Trend pendapatan dari 2011-2019 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan trend pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun 2019, namun penurunan tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan pencapaian trend pendapatan usaha pada tahun 2018 yaitu sebesar 234%, terjadi penurunan yang

signifikan pada tahun 2020 menjadi 162%, terjadi penurunan sebesar 72%. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, hingga akhir tahun 2020 PT Adhi Karya berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp10.828 miliar, turun 29,27% dari tahun sebelumnya Rp15.308 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan Perolehan kontrak baru sebagian besar terjadi di triwulan IV, sehingga belum bisa terkonversi menjadi pendapatan usaha dan akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada proses produksi pada tahun 2020 menjadi kurang maksimal sehingga tingkat burn rate mengalami penurunan sebesar 8,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,29% menjadi 22,16% pada tahun 2020.

Sedangkan untuk Trend Laba Bersih PT Adhi Karya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, Peningkatan trend laba bersih terbesar terjadi pada tahun 2013, terjadi peningkatan sebesar 107%, pada tahun 2014 trend laba bersih yaitu sebesar 224% dibandingkan dengan trend laba bersih pada tahun 2013 sebesar 117%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan laba bersih yang sangat drastis, yaitu dengan trend laba bersih sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dengan trend laba bersih sebesar 365%. PT Adhi Karya (Persero) Tbk hanya mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 23,98 miliar. Laba tersebut turun drastis 96% dari laba yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp 663,8 miliar. Berdasarkan laporan keuangan, BUMN ini mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan turunnya laba, baik itu laba kotor, EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), dan laba bersih yang ikut turun signifikan. Dalam laporannya, manajemen ADHI mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun lalu dan sampai saat ini masih terjadi adalah penghambat bagi perseroan. ADHI menjelaskan bahwa virus Covid-19 mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

Selanjutnya untuk PT Pembangunan Perumahan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: (data diolah, 2022)

Grafik 10

**PT Pembangunan Perumahan Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam %)**

Berdasarkan Grafik 10 dapat dilihat Trend Aset PT Pembangunan Perumahan terus mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2011-2020. Peningkatan trend tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 982%, hal tersebut dapat diartikan bahwa aset perusahaan mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun dasar. Peningkatan trend aset drastis terjadi pada tahun 2017, yaitu dari trend aset sebesar 449% pada tahun 2016 menjadi 659% pada tahun 2017, meningkat 210% dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah aset perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp52,55 triliun meningkat 25,77% dari Rp41,78 triliun pada tahun 2017. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan yang masing-masing tumbuh sebesar 25,50% dan 26,44%. Aset lancar PTPP meningkat Rp7,63 triliun atau 25,50% dari Rp29,91 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp37,53 triliun pada tahun 2018. Peningkatan ini antara lain didorong oleh meningkatnya persediaan, serta piutang usaha pihak berelasi dan ketiga yang masing-masing meningkat sebesar Rp2,24 triliun, Rp2,07 triliun dan Rp1,92 triliun. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada piutang usaha berelasi sebesar 395,91% dari Rp523,43 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2,60 triliun pada tahun 2018. Aset tidak lancar PTPP meningkat Rp3,14 triliun atau 26,44% dari Rp11,87 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp15,01 triliun pada tahun 2018. Peningkatan ini didorong oleh hampir seluruh komponen aset tidak lancar. Pertumbuhan terbesar terjadi pada investasi jangka panjang lainnya, property investasi, dan aset tak berwujud yang masing-masing tumbuh 67,52%, 135,05%, dan 88,12%.

Kemudian Trend Liabilitas terus mengalami peningkatan pada 2011-2020. Peningkatan trend liabilitas tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 934%, yang artinya terjadi peningkatan yang besar dibandingkan dengan tahun dasar. Peningkatan trend yang cukup besar terjadi pada tahun 2017-2019, Jumlah liabilitas PTPP 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp8,69 triliun atau tumbuh 31,57% dari Rp27,54 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp36,23 triliun pada tahun 2018. Peningkatan tersebut didorong oleh tumbuhnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang masing-masing meningkat sebesar 28,15% dan 41,92%.

Selanjutnya diikuti dengan Trend Ekuitas PT Pembangunan Perumahan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan ekuitas. Peningkatan trend ekuitas tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.215%, yang artinya meningkat sebesar 1.115% dibandingkan dengan tahun dasar, artinya terjadi peningkatan yang sangat besar dari pos ekuitas PT Pembangunan Perumahan. Peningkatan ekuitas yang sangat drastis terjadi sejak 2015-2019. “PTPP mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp2,07 triliun atau 14,55% menjadi Rp16,31 triliun pada tahun 2018 dari Rp14,24 triliun pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama didorong oleh saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan kepentingan non-pengendali yang masing-masing meningkat sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh 44,54%, serta kepentingan non-pengendali sebesar Rp760,47 miliar atau tumbuh 27,26%”. Pada 2020 terjadi penurunan ekuitas, total ekuitas Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp14,00 triliun, mengalami penurunan 6,69% dibandingkan total ekuitas tahun 2019 sebesar Rp15,01 triliun. Jumlah Ekuitas Perusahaan dipengaruhi oleh Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk yang terdiri dari Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, Penghasilan Komprehensif Lain, dan Saldo Laba; serta Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali. Dibandingkan tahun 2019, Jumlah Ekuitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,69% yang terutama disebabkan penurunan laba bersih di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

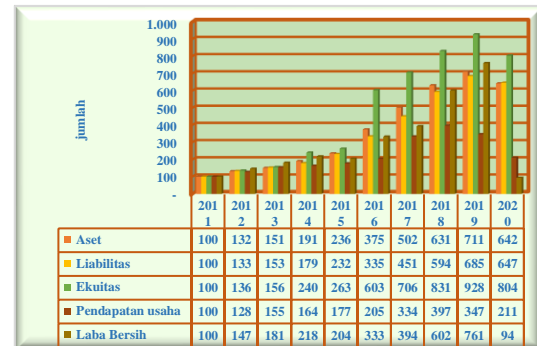
Selanjutnya untuk Trend Pendapatan Usaha PT Pembangunan Perumahan mengalami peningkatan setiap tahunnya,

adapun trend peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pos aset, liabilitas dan ekuitas. Trend pendapatan usaha tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan trend pendapatan usaha sebesar 398%. Peningkatan terjadi dari tahun 2011-2019 kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan trend pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun 2019. "Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp15,83 triliun, mengalami penurunan 32,84% atau setara dengan Rp7,74 triliun dibandingkan Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp23,57 triliun. Penurunan Pendapatan Usaha terutama dipengaruhi oleh penjualan pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan penjualan jasa konstruksi pada tahun 2019. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan stabilitas ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap kondisi pasar dan keseluruhan sektor baik sektor konstruksi, EPC, dll. Di sisi sektor konstruksi, penurunan pendapatan pada sektor konstruksi sebesar 33,95% dikarenakan penurunan produksi yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga dipengaruhi oleh penurunan ekonomi. Di sisi segmen EPC, pendapatan mengalami penurunan yang disebabkan proyek-proyek yang menjadi backbone merupakan proyek Joint Operation (JO) sehingga tidak memberikan kontribusi pada pendapatan dari sektor EPC". Di sisi lain, proyek-proyek pada segmen EPC adalah proyek-proyek multiyears yang baru diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 keadaan dan penilaian yang ada.

Sedangkan untuk Trend Laba Bersih PT Pembangunan Perumahan mengalami kenaikan dari tahun 2011-2018. Trend laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 815%, yaitu 8 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tahun dasar, namun laba bersih turun drastis pada tahun 2019 menjadi 503%, kemudian pada tahun 2020 terjadi kembali penurunan laba bersih yang cukup drastis menjadi 111% yaitu dengan trend laba bersih sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dengan trend laba bersih sebesar 365%. "Laba Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp266,27 miliar, mengalami penurunan 74,60% atau setara dengan Rp781,88 miliar dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp1,04 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah penurunan pendapatan yang mempengaruhi penurunan laba kotor di

tahun berjalan. Penurunan pendapatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh dampak dari penurunan stabilitas ekonomi atas adanya pandemi COVID-19 yang turut berpengaruh pada kinerja sektor konstruksi di tahun 2020."

Selanjutnya untuk PT Wijaya Karya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: (data diolah, 2022)

**Grafik 11**  
**PT Wijaya Karya Tahun Anggaran 2011-2020**  
**(dalam %)**

Berdasarkan Grafik 11 dapat dilihat Trend Pos Aset PT Wijaya Karya terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020. Peningkatan trend tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan trend aset sebesar 711%, hal tersebut dapat diartikan bahwa aset perusahaan mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun dasar. Aset terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2019 namun pada tahun 2020, terjadi penurunan aset.

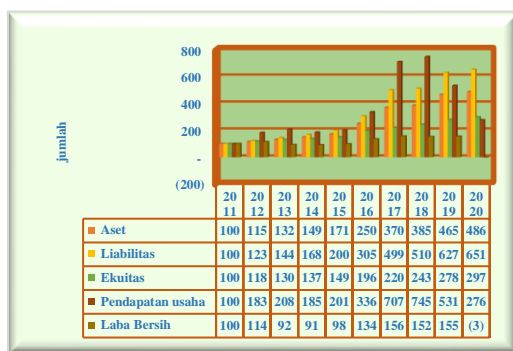
Kemudian Trend Liabilitas mengalami peningkatan pada 2011-2019 kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, Peningkatan trend liabilitas tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 685%, yang artinya terjadi peningkatan yang besar dibandingkan dengan tahun dasar. Selanjutnya diikuti dengan Trend Ekuitas PT Wijaya Karya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan ekuitas. Peningkatan trend ekuitas tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 928% turun menjadi 804% pada tahun 2020. Jumlah Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2020, mengalami penurunan 13,31% menjadi Rp16.657.425 juta, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.215.733 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penerapan PSAK 71 yang mengurangi saldo laba Perseroan.

Selanjutnya untuk Trend Pendapatan Usaha PT Wijaya Karya mengalami

peningkatan dari tahun 2011-2018, adapun trend peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pos aset, liabilitas dan ekuitas. Trend pendapatan usaha tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan trend pendapatan usaha sebesar 397%. Pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan trend pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami penurunan 39,23% menjadi Rp16.536.382 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp27.212.914 juta. Penurunan ini lebih disebabkan oleh dampak COVID-19 pada kinerja Perseroan.

Sedangkan untuk Trend Laba Bersih PT Wijaya Karya mengalami kenaikan dari tahun 2011-2018. Trend laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 761%, laba bersih turun drastis pada tahun 2020 menjadi 94%, yang artinya terjadi penurunan melebihi nilai tahun dasar. Laba Bersih Tahun Berjalan yang berhasil dibukukan Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp322.343 juta mengalami penurunan sebesar 87,70% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2.621.015 juta. Penurunan tersebut lebih dikarenakan oleh penurunan penjualan dan laba kotor Perseroan.

Selanjutnya untuk PT Jasa Marga dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: (data diolah, 2022)

Grafik 12

PT Jasa Marga Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam %)

Berdasarkan Grafik 12 dapat di lihat Trend Aset PT Jasa Marga terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020. Peningkatan trend tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan trend aset sebesar 486%, hal tersebut dapat diartikan bahwa aset perusahaan mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun dasar. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu pada tahun 2017 sebesar 370% meningkat 120%

dibandingkan 370% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dapat kita lihat trend aset perusahaan mengalami kenaikan menjadi 370 berdasarkan hasil analisa didapat Aset 2017 sebesar Rp 79,19 triliun terdiri dari aset lancar sebesar Rp 18,99 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp 60,21 triliun. Aset meningkat sebesar Rp 25,70 triliun atau 48,02% dibandingkan terhadap aset 2016 sebesar Rp 53,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset bersih tidak berwujud Perseroan sejalan dengan pembangunan ruas jalan tol baru yang dibangun oleh Perseroan. Aset lancar 2017 sebesar Rp18,99 triliun, meningkat Rp6,02 triliun atau 46,45% dibandingkan aset lancar 2016 sebesar Rp12,96 triliun. Peningkatan ini terutama terjadi pada piutang lain-lain sebesar Rp 3,3 triliun pada tahun 2017, disebabkan oleh peningkatan piutang dana talangan tanah sejalan dengan progres peningkatan pembebasan lahan jalan tol baru proyek. Aset tidak lancar perusahaan 2017 sebesar Rp60,21 triliun, meningkat Rp19,67 triliun atau 48,53% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp40,53 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hak konsesi Perseroan sejalan dengan kegiatan konstruksi entitas Anak Jalan Tol.

Kemudian Trend Liabilitas mengalami peningkatan pada tahun 2011-2020, Peningkatan trend liabilitas tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 651%, yang artinya terjadi peningkatan yang besar dibandingkan dengan tahun dasar. Jika dilihat peningkatan yang secara drastis terjadi pada tahun 2017, yaitu meningkat sebesar 194% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017 terjadi peningkatan trend liabilitas dibandingkan tahun 2016 yaitu 305% menjadi 499%, Liabilitas 2017 menjadi Rp60,83 triliun yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar menjadi Rp25,0 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp35,83 triliun. Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp23,67 triliun atau 63,70% dibandingkan dengan liabilitas 2016 sebesar Rp37,16 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak berelasi yang digunakan untuk pembangunan jalan tol baru dan biaya yang masih harus dibayar karena peningkatan pembayaran kontraktor sejalan dengan progres pembangunan jalan tol baru.

Selanjutnya diikuti dengan Trend Ekuitas PT Jasa Marga juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011-2020. Selanjutnya untuk Trend Pendapatan Usaha PT Jasa Marga mengalami peningkatan dari tahun 2011-2020, adapun trend peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pos aset, liabilitas dan ekuitas. Trend pendapatan usaha tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan trend pendapatan usaha sebesar 745%. Pada tahun 2018 pendapatan mencapai Rp36,97 triliun atau naik 5,36% dari Pendapatan tahun 2017. Untuk dapat melakukan analisa secara lebih tepat, diharapkan untuk dapat menggunakan pendapatan diluar pendapatan konstruksi. Hal ini mengingat, Pendapatan Konstruksi akan net off dengan beban konstruksi, dan margin konstruksi yang didapatkan tidak signifikan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan trend pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun 2018, pendapatan mencapai Rp26,35 triliun atau menurun 28,75% dari Pendapatan tahun 2018. Kemudian diikuti penurunan ditahun 2020 yaitu menjadi 276%. Pendapatan Usaha di tahun 2020 senilai Rp9,59 triliun, turun Rp1,40 triliun atau 12,71% dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada mobilitas orang, barang dan jasa, yang menyebabkan turunnya volume kendaraan, sehingga Pendapatan Tol turun 13,50% dari tahun 2019.

Sedangkan untuk Trend Laba Bersih PT Jasa Marga mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2020. Trend laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 155%, laba bersih turun drastis pada tahun 2020 menjadi -3%, yang artinya terjadi penurunan yang sangat drastis melebihi nilai tahun dasar. Laba (Rugi) Tahun Berjalan mencapai rugi senilai Rp41,63 miliar, turun Rp2,12 triliun atau 102,01% dari tahun 2019. Rugi Tahun Berjalan khususnya berasal dari Laba Sebelum Pajak Penghasilan senilai Rp696,45 miliar. Sedangkan Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk mencapai laba senilai Rp501,05 miliar. Perusahaan tetap dapat mencetak Laba Bersih di tengah kondisi penurunan Pendapatan Tol karena adanya pandemi COVID-19 dan kenaikan Biaya Keuangan karena pengoperasian ruas-ruas tol baru.

Berdasarkan hasil penelitian Aria Masdiana Pasaribu (2014), yang menyatakan

bahwa “Pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, jika pendapatan usaha yang di dapat perusahaan mengalami kenaikan otomatis laba bersih perusahaan akan mengalami peningkatan”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Wirathna (2017:197) Kelancaran usaha nantinya akan memberikan dampak terhadap perolehan net profit atau laba bersih. Dapat disimpulkan bahwa perolehan laba bersih menjadi penting bagi perusahaan dan lebih penting lagi adalah peningkatan perolehan laba bersih setiap periodenya, sehingga memberikan gambaran bahwa perusahaan maju atau baik.

Sebagai entitas bisnis, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aset, ekuitas, pendapatan, maupun laba bersih. Pertumbuhan total aktiva, ekuitas dan total pendapatan menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia cukup baik.

### **Kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap pendapatan negara**

Dilihat dari kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap pendapatan negara selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terus mengalami fluktuasi, dalam kontribusinya ke pendapatan negara mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kontribusi tersebut akan diklasifikasi lebih rinci berdasarkan masing-masing perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 2**

#### **Kontribusi Laba PT Semen Baturaja (Persero) Tbk terhadap Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Negara (dalam Rupiah)	PT Semen Baturaja (dalam Rupiah)	Kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	50.192.161.252	0,0041%
2012	1.338.109.629.172.950	50.328.000.000	0,0038%
2013	1.438.891.069.562.740	59.702.504.600	0,0041%
2014	1.550.490.813.616.970	59.500.286.794	0,0038%
2015	1.508.020.372.856.320	62.578.848.563	0,0041%
2016	1.555.934.150.832.790	67.500.000.000	0,0043%
2017	1.666.375.912.658.080	49.380.750.000	0,0030%
2018	1.943.674.876.878.790	27.704.250.000	0,0014%
2019	1.960.633.583.585.980	14.325.000.000	0,0007%
2020	1.647.783.342.188.980	107.005.744.428	0,0065%
Rata-rata	1.582.051.340.471.300	54.821.754.564	0,0036%

Sumber: (data diolah, 2022)

Dari tabel 2, kontribusi laba PT Semen Baturaja (Persero) Tbk memberikan kontribusi tertinggi yaitu dengan persentase 0,0065% pada tahun 2020, diikuti persentase terendah sebesar 0,0007% pada tahun 2019. Adapun rata-rata kontribusi PT Semen Baturaja terhadap pendapatan negara selama 10 tahun yaitu sebesar 0,0036%.

**Tabel 3**  
**Kontribusi Laba PT Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Negara (dalam Rupiah)	PT Adhi Karya (dalam Rupiah)	Kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	29.719.000.000	0,0026%
2012	1.338.109.629.172.950	27.864.000.000	0,0026%
2013	1.438.891.069.562.740	21.582.549.240	0,0026%
2014	1.550.490.813.616.970	62.114.450.560	0,0026%
2015	1.508.020.372.856.320	33.055.278.955	0,0026%
2016	1.555.934.150.832.790	47.626.969.746	0,0026%
2017	1.666.375.912.658.080	47.958.005.533	0,0026%
2018	1.943.674.876.878.790	52.572.750.063	0,0026%
2019	1.960.633.583.585.980	65.704.694.672	0,0026%
2020	1.647.783.342.188.980	33.854.377.955	0,0026%
Rata-rata	1.582.051.340.471.300	42.205.207.672	0,0026%

Sumber : (data diolah, 2022)

Dari tabel 3, kontribusi laba PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan kontribusi dengan persentase 0,00% pada tahun 2011-2020.

**Tabel 4**  
**Kontribusi Laba PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Infrastruktur terhadap Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Negara (dalam Rupiah)	PT Pembangunan Perumahan (dalam Rupiah)	Kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	35.994.151.719	0,0030%
2012	1.338.109.629.172.950	50.328.000.000	0,0038%
2013	1.438.891.069.562.740	47.392.444.564	0,0033%
2014	1.550.490.813.616.970	64.368.297.297	0,0042%
2015	1.508.020.372.856.320	54.258.051.438	0,0036%
2016	1.555.934.150.832.790	76.079.311.470	0,0049%
2017	1.666.375.912.658.080	156.575.528.878	0,0094%
2018	1.943.674.876.878.790	148.222.628.708	0,0076%
2019	1.960.633.583.585.980	14.325.000.000	0,0007%
2020	1.647.783.342.188.980	107.005.744.428	0,0065%
Rata-rata	1.582.051.340.471.300	75.454.915.850	0,0047%

Sumber : (data diolah, 2022)

Dari tabel 4, kontribusi laba pada tahun 2011-2016 dengan kontribusi sebesar 0,00%. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk memberikan kontribusi tertinggi yaitu dengan persentase 0,01% pada tahun 2017, 2018, dan

2020. Sedangkan kontribusi para tahun 2019 kembali menjadi 0,00%.

**Tabel 5**  
**Kontribusi Laba PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terhadap Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Negara (dalam Rupiah)	PT Wijaya Karya (dalam Rupiah)	Kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	68.336.000.000	0,0056%
2012	1.338.109.629.172.950	70.232.000.000	0,0052%
2013	1.438.891.069.562.740	89.648.000.000	0,0062%
2014	1.550.490.813.616.970	111.498.800.000	0,0072%
2015	1.508.020.372.856.320	80.112.400.000	0,0053%
2016	1.555.934.150.832.790	81.400.000.000	0,0052%
2017	1.666.375.912.658.080	197.587.276.005	0,0119%
2018	1.943.674.876.878.790	156.491.377.209	0,0081%
2019	1.960.633.583.585.980	225.253.800.804	0,0115%
2020	1.647.783.342.188.980	297.314.781.801	0,0180%
Rata-rata	1.582.051.340.471.300	137.787.443.582	0,0084%

Sumber : (data diolah, 2022)

Dari tabel 5, kontribusi laba PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memberikan kontribusi tertinggi yaitu dengan persentase 0,02% pada tahun 2020, diikuti persentase 0,01% pada tahun 2011-2019.

**Tabel 6**  
**Kontribusi Laba BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhadap Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2011-2020**

Tahun	Pendapatan Negara (dalam Rupiah)	PT Jasa Marga (dalam Rupiah)	Kontribusi
2011	1.210.599.653.359.410	503.078.702.408	0,0416%
2012	1.338.109.629.172.950	375.461.184.000	0,0281%
2013	1.438.891.069.562.740	448.585.264.400	0,0312%
2014	1.550.490.813.616.970	374.168.844.000	0,0241%
2015	1.508.020.372.856.320	343.840.028.000	0,0228%
2016	1.555.934.150.832.790	205.293.564.000	0,0132%
2017	1.666.375.912.658.080	396.755.671.917	0,0238%
2018	1.943.674.876.878.790	308.035.889.138	0,0158%
2019	1.960.633.583.585.980	231.273.043.423	0,0118%
2020	1.647.783.342.188.980	77.249.117.305	0,0047%
Rata-rata	1.582.051.340.471.300	326.374.130.859	0,0217%

Sumber : (data diolah, 2022)

Dari tabel 6, kontribusi laba PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan kontribusi tertinggi yaitu dengan persentase 0,0416% pada tahun 2011, diikuti persentase 0,0281% pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 0,0312%. Kemudian, persentase 0,0241% pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 0,0228%. Selanjutnya persentase 0,0132% pada tahun 2016, kemudian kembali naik menjadi 0,0238% pada



tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 dengan persentase 0,0158%. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu dengan persentase 0,0118, kemudian dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,0047%

Jika dilihat dari perusahaan yang mengalami penurunan kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur setiap tahunnya yaitu PT Jasa Marga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi laba PT Jasa Marga dilihat dari nominalnya yang besar, namun nilai tersebut terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2011-2020, kelima perusahaan sektor jasa infrastruktur yang diteliti mengalami penurunan kontribusi disebabkan oleh pengaruh dari pendapatan dan laba bersih yang diterima masing-masing perusahaan juga mengalami penurunan. Faktor utama penurunan pendapatan dan laba bersih yang terjadi disebabkan oleh terhambat dan terganggunya operasional penjualan perusahaan baik karena faktor internal perusahaan seperti kinerja perusahaan dalam mengelola pendapatan operasional perusahaan yang belum optimal. Selain faktor internal perusahaan yang menyebabkan pendapatan dan laba bersih perusahaan mengalami penurunan ialah karena faktor eksternal perusahaan seperti pengaruh ekonomi dunia yang terganggu secara global yang pada saat tahun 2020 dilanda pandemik sehingga mengakibatkan penjualan perusahaan mengalami penurunan laba hingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian seperti yang terjadi pada PT Jasa Marga.

Untuk meninjau kinerja perusahaan dapat pula dilihat dari besaran kontribusi perusahaan memberikan persentase labanya sebagai bentuk kontribusi untuk pendapatan negara. Jika dihitung secara rata-rata masing-masing perusahaan memberikan kontribusi sebesar **0,0036%** untuk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan persentase tertinggi sebesar 0,0065% pada tahun 2020 dan terendah 0,0007% pada tahun 2019. Kontribusi sebesar **0,0026%** untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan persentase tertinggi sebesar 0,0040% dan terendah 0,0015%. Kontribusi **0,0047%** untuk PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan persentase tertinggi sebesar 0,0094% dan terendah 0,0007%. Kemudian **0,0084%** untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan persentase tertinggi sebesar

0,0115% dan terendah 0,0052%. Terakhir dengan rata-rata tertinggi sebesar **0,0217%** untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan persentase tertinggi sebesar 0,0416% dan terendah 0,0047%. Dari rata-rata yang telah dihitung didapatkan kesimpulan bahwa kelima perusahaan bidang jasa infrastruktur tersebut selama sepuluh tahun terakhir tercatat sejak tahun 2011-2022 dengan total keseluruhan sebesar **0,0041%** sebagai kontribusi laba BUMN terhadap pendapatan negara.

## 5. SIMPULAN

Adapun berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja BUMN sektor jasa infrastruktur terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aset, ekuitas, pendapatan usaha, maupun laba bersih. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis nilai liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha dan laba bersih. Selama periode 2011-2020, total aset dan ekuitas BUMN tumbuh rata-rata sebesar 21% dan 28% per tahun, Sementara itu, pendapatan usaha dan laba bersih masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 11% dan 2% persen per tahun. Sedangkan kewajiban tumbuh rata-rata 22% per tahun.
2. Tingkat kontribusi laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap pendapatan negara hanya mencapai rata-rata kontribusi 0,0041% selama 10 tahun terakhir. Kontribusi terbesar adalah berasal dari penerimaan laba PT Jasa Marga Tbk, dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir memberikan kontribusi sebesar 0,0217% dan yang terendah yaitu berasal dari PT Adhi Karya dengan rata-rata sebesar 0,0026%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2006. "Studi atas Belanja Ekuitas pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (2).
- Achmadi, A., dan Narbuko. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adetya, Bima. 2014. "Penerimaan Negara". *Jurnal Ilmiah*. Program Studi Akuntansi

- Fakultas Ekonomi Universitas Stan.  
Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ariasih dan Sunarsih. 2017. "Pengaruh Profitabilitas Struktur Kepemilikan dan Struktur Moddal terhadap Kebijakan Instansi Dividen". *Jurnal Riset Akuntansi* 7(1).
- Asmara, Jhon Andra. 2010. "Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 3(2).
- Asnawi, Said Kelana, Chandra Wijaya, 2016, FINON (Finance for Non Finance) Manajemen Keuangan untuk Non Keuangan, Edisi 1 Cetakan 2, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi Utari, Ari Purwanti dan Darsono Prawironegoro. (2014). *Manajemen 12345 Keuangan edisi revisi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Nuralia, Elly. 2018. *Kontribusi PT Semen Indonesia bagi penerimaan negara bukan pajak setelah privatisasi: Laporan Keuangan tahun 2014-2016*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- N Nurmiati, F Diana, M Murbayani (2019) "Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia*, 89-100.
- ES Hamid. UII Press, 2005. "Peran dan intervensi pemerintah dalam perekonomian". ES Hamid. *Economic Journal of Emerging Markets* 4 (1), 41-58, 1999.
- G.T.Suroso.2014. *BUMN dan Penerimaan Negara*.
- Harahap, S. 2005. *Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Harahap, S. S. 2017. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendar & Tanjung, R. 2020. "Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi Dan Sinergitas Pengelolaan APBN dan APBS di Kabupaten Karawang". *Jurnal Proaksi*, 7(2), 55-56.
- I. Koto. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ,". in *Sintesa*, 1(1), pp. 458–
- Kamaliah, dkk (2009). *Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Leverage Keuangan, Ukuran, Dan Umur Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Wholesale And Retail Trade Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesi*. *Jurnal Ekonomi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya, Volume 17, Nomor 3 Desember 2009.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. 2014.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2016. *Masterplan Kementerian BUMN 2010-2014*
- Kinerja BUMN Infrastruktur. 2021, April, 11. Waskita & HK Rugi; PTPP, WIKA, ADHI Masih Cetak Laba. (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kinerja-BUMN-infrastruktur-waskita-and-hk-rugi-ptpp-wika-adhi-masih-cetak-laba-1vWxgEbcfVL/full>). Diakses pada Maret, 2022
- Kurniawati, L. 2017. "Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 90-106.
- L. M. Syamryn, 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Lukman, H., & Irisha.T. 2020. "The Effect of Creative Prqactices with Statutory Auditoras Mediation, and Accountant

- Ethics Standards on the Reliability of Financial Statement”. *Advance in Social Science Education and Humanities Reseach. Proceeding of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities TICASH (2020)*. (478), 2023-2029.
- Martono dan Agus Harjito. 2002. *Manajemen Keuangan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Nemec, I & Spacek, D. 2020. “The covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia”. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 837-846.
- N Nurmiati, F Diana, L Lasmana. 2019. “Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar” *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar* 1 (1), 14-23.
- Nainggolan, E. U. 2020. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19*.
- Parmadi, P. 2011. “Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Indonesia Periode 1990 – 2007”. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Prasinta, D. 2012. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Rahardjo, B. 2000. *Memahami Laporan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Andi Offset : Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perkonomian Nasional dan Kesejahteraan*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.
- Republik Indonesia. 2018. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Sanjaya, W. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*.
- Sari, Ati Retna, 2014, “Kajian Tentang Dividend Puzzle dan Bukti Empiris”. *Jurnal Modernisasi*. 10(1), Februari 2014.
- Sayadi, M. H. 2021. “APBN 2020: Analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi covid-19”. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159-171.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Subramanyam. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiharto, 2007. *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Indonesia Hari ini dan Masa Depan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2014) Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.

Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Yuniarti dan Purnawati. 2017. Manajemen Keuangan (Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan). PT Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, A. 2011. Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum. PT. Alumni. Veno Andri. 2016. "Analisis Trend Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2015-2017". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 4(1).

Surjarweni, V Wiratna (2017). Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Veno, A.,S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2015 Sampai Dengan 2017. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1)

Wiyono, Gendro, Hadri Kusuma. 2017. Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate Value Creation, Edisi 1 Cetakan 1, Penerbit UPP STIM YKPN.